

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara yang sejahtera bisa dilihat melalui kondisi kesehatan masyarakatnya. Dalam suatu negara, pemerintah memiliki peran sebagai pemberi informasi yang mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan dan menyediakan layanan kesehatan agar masyarakat dapat mencapai status kesehatan yang baik, meskipun faktanya tidak ada satu negara pun yang bisa bebas dari ancaman kesehatan, kesehatan nasional harus diusahakan semaksimal mungkin. Hal ini berarti kesehatan masyarakat memiliki urgensi sebagai prioritas suatu pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan negara yang sejahtera.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan adanya program/kegiatan terkait dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan di bidang kesehatan agar dapat dijangkau oleh seluruh warga Indonesia di tiap daerah. Pemerintah melakukan pemberian layanan kesehatan kepada semua masyarakat demi mencapai status kesehatan yang baik. Dimulai dari puskesmas, klinik umum, dokter yang terdaftar dalam mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta rumah sakit pratama yang merupakan unit tingkat pertama.

Puskesmas merupakan unit tingkat pertama bagi masyarakat untuk menikmati fasilitas kesehatan. Unit kesehatan ini memiliki peran untuk melakukan pelayanan kesehatan terpadu kepada masyarakat serta melakukan pengembangan dan pembinaan kesehatan di daerah sekitar puskesmas. Puskesmas dibangun sebagai langkah preventif terhadap ancaman kesehatan yang dapat menerjang masyarakat, juga memudahkan pelayanan kesehatan pada tingkat pertama. Puskesmas memegang peranan penting karena menjadi indikator keberhasilan dari pembangunan kesehatan. Dalam menjalankan fungsinya, puskesmas sebagai unit pelaksana memiliki tanggung jawab keuangan negara kepada pemerintah.

Pendanaan operasional puskesmas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, Pendanaan puskesmas yang berasal dari APBN berasal dari Transfer ke Daerah, ini tercantum dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 22 yakni “dana perimbangan dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”. Dana yang diklasifikasikan sebagai dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” Dana ini berfungsi untuk mendanai program yang menjadi prioritas nasional yang ada di

daerah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Nonfisik memiliki tujuan yaitu untuk memiliki layanan publik yang berkualitas dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, baik dari segi aksesibilitasnya maupun perihal harga pelayanannya. Salah satu cakupan layanan publik yang dituju oleh DAK Nonfisik, yakni cakupan di bidang kesehatan yang biasa disebut dengan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. DAK Nonfisik Bidang kesehatan terdiri dari beberapa jenis yang salah satunya adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Dana BOK dimanfaatkan untuk kegiatan yang diprioritaskan oleh puskesmas. Dana BOK bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat terutama untuk upaya preventif dan promotif di wilayah kerja puskesmas. Layanan dari Dana BOK ini adalah bantuan operasional, jaminan persalinan, dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, yang berisi “Dana BOK tidak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan utama, oleh karena itu, masing-masing daerah diharapkan menjadi lebih inovatif dalam memanfaatkan Dana BOK untuk pembangunan pelayanan dan fasilitas kesehatan”. Pentingnya Dana BOK untuk pelayanan kesehatan di daerah terutama untuk meringankan biaya operasional kegiatan puskesmas, mengingat ada begitu banyak permasalahan terkait kesehatan di seluruh daerah di Indonesia.

Pengelolaan Dana BOK sangatlah penting untuk diperhatikan karena agar mencapai tujuan yang telah ditentukan haruslah butuh pengawasan ekstra. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan disebutkan, “Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah meliputi pengusulan kegiatan, penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan”. Oleh karena itu, pengelolaan Dana BOK Puskesmas tahun 2021 harus dijalankan sesuai dengan peraturan tersebut agar tujuan yang ada dapat dicapai dengan optimal.

Sebagai usaha pemerintah untuk mewujudkan negara yang memiliki status kesehatan yang baik maka Dana BOK dianggarkan ke setiap daerah. Di Banjarmasin sendiri ada 26 puskesmas yang mendapatkan Dana BOK. Puskesmas di daerah ini membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat khususnya Dana BOK untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan agar semakin memadai dan berjalan secara optimal meskipun dana ini sifatnya sebagai tambahan sehingga perlu peran pemerintah daerah setempat.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meninjau salah satu jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan di Kota Banjarmasin, yakni terkait Dana BOK Puskesmas. Penulis menuangkan hasil tinjauan tersebut ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSKESMAS TERMINAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan latar belakang tersebut adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Terminal?
2. Apakah pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Terminal tersebut sudah mencapai tujuannya?
3. Apakah pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Terminal sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan pada tahun terkait?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan KTTA yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya:

1. Untuk memperoleh informasi bagaimana pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Terminal Banjarmasin;
2. Untuk meninjau bahwa pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Terminal sudah mencapai tujuannya;
3. Untuk meninjau bahwa pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Terminal Banjarmasin sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang terkait.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Permasalahan mengenai Dana BOK sangatlah luas, oleh karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan pengetahuan penulis maka ruang lingkup penulisan KTTA ini adalah:

1. Lokasi penelitian merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin; dan
2. Dana yang ditinjau adalah data tahun anggaran 2021

KTTA ini menggunakan dasar hukum yang berasal dari undang-undang dan peraturan menteri yakni Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 pasal 22 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021. KTTA ini juga menggunakan sumber daya manusia yang terlibat, serta mekanisme dari perencanaan dan pengelolaan dari Dana BOK.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Manfaat penulisan bagi penulis adalah untuk mendapatkan informasi, pengalaman, dan memperluas wawasan mengenai Dana BOK di Puskesmas Terminal Banjarmasin.

2. Institusi Pendidikan

Manfaat penulisan KTTA ini juga sebagai bahan referensi pendidikan dan masukan dalam penelitian bagi mahasiswa selanjutnya, khususnya untuk mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara

3. Instansi Terkait

Manfaat juga dapat ditujukan kepada instansi terkait yang menjadi subjek penelitian yaitu Puskesmas Terminal sebagai bahan masukan terhadap mekanisme yang berjalan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan KTTA yang akan digunakan oleh penulis sebagaimana di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dan latar belakang penulisan KTTA ini. Dalam bagian ini penulis membahas tentang Dana BOK secara garis besar dan pentingnya fungsi dari Dana BOK. Beberapa subbab yang terdapat antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sistematika, dan ruang lingkup penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan tentang dasar teori yang digunakan dalam penyusunan KTTA ini. Dengan menggunakan dasar-dasar hukum, peraturan, undang-undang yang mengatur pengelolaan Dana BOK.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai bagaimana metode yang akan digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penulisan. Kemudian membahas mengenai pengelolaan Dana BOK secara lebih mendalam berdasarkan praktik di lapangan. Serta menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana proses penyaluran, dan proses pencairan Dana BOK tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini menyimpulkan seluruh pembahasan dari bab sebelumnya, menarik kesimpulan dari penelitian Dana BOK yang telah dilakukan oleh penulis, serta berisi saran baik kepada penulis maupun kepada lokasi penelitian sebagai penutup dari KTTA ini.